



RENCANA KINERJA TAHUNAN

2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SINJAI

KATA PENGANTAR

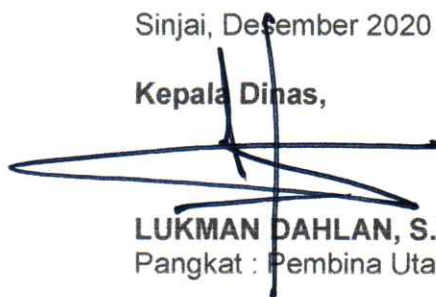
Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program- program yang akan dijalankan oleh seluruh aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai .

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan dokumen kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, Desember 2020

Kepala Dinas,



LUKMAN DAHLAN, S.IP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020.....	6
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021.....	8
BAB III PENUTUP	11
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana bidang Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
3. pengkoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan lembaga Pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Urusan Penanaman Modal adalah Berkembangnya iklim usaha dan investasi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2015-2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
 13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
16. Peraturan Daerah tentang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai;
17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun evaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah :

1. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2021; dan
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

2.1 Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan yang akan memberikan informasi sejauhmana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.
3. Program pendukung

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

Tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2020 berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 serta berorientasi pada Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.

Adapun Sasaran Strategis, indikator sasaran, target dan realisasi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1, Meningkatnya investasi (PMDN), dengan indikator, target dan realisasi :

- a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN) dengan target 1 Investor berskala nasional. Dari 68 PMDN dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000, ada 8 PMDN dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000, dengan 1 PMDN yang berskala nasional. Sehingga, untuk indikator Jumlah Investor Berskala Nasional mencapai target 100%.
- b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp. Juta). dengan target yang ingin dicapai adalah Rp. 1.000.000.000,-. Untuk tahun 2020, target ini tercapai, karena adanya investor berskala nasional dengan nilai investasi Rp. 2.000.000.000.

Sasaran 2, Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan target nilai 85,88. Untuk indikator ini mencapai nilai 89,22. Hal ini sesuai dengan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setdakab Sinjai.

Pencapaian target indikator sasaran strategis, didukung oleh 3 Program Teknis dan 10 Kegiatan Teknis. Adapun program yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Program ini dilaksanakan untuk memberikan informasi tentang potensi dan peluang investasi daerah di Kabupaten Sinjai baik bagi investor lokal, nasional dan internasional. Dengan adanya promosi yang dilaksanakan, diharapkan adanya kerjasama para investor dengan pengusaha lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sinjai

Adapun outcome dari program ini adalah Jumlah Minat Investasi dengan target 10 Calon Investor. Capaian target untuk tahun ini sejumlah 5 calon investor atau hanya tercapai 50%. Pagu anggaran program ini adalah Rp 34.681.500,00,- dengan realisasi Rp. 34.670.000,00, atau 99,97%. Untuk Tahun 2020, Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah calon investor, hal ini disebabkan oleh menurunnya minat investasi para pengusaha karena adanya pandemi Covid 19.

2. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Program ini dilaksanakan untuk memberikan situasi yang kondusif berupa rasa aman, kemudahan berusaha bagi para penanam modal ketika berinvestasi di Kabupaten Sinjai Pagu anggaran program ini adalah Rp. 15.069.900,00 dengan realisasi Rp. 15.040.000,00 atau 99,80%. Indikator outcome dari program ini adalah Jumlah Realisasi Investasi, dengan target tahun ini Rp.1.312.938.813.787,-. Realisasi yang dimaksud adalah realisasi investasi usaha baik yang berizin maupun tidak berizin. Adapun capaian tahun ini adalah Rp.1.371.308.078.430 atau mencapai 104,45%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum yang akan melakukan pengurusan izin baik secara online maupun manual. Indikator outcome dari program ini adalah Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang ditindaklanjuti

dengan target 100% dengan realisasi capaian 100%. Adapun pagu anggaran program ini adalah Rp. 229.667.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 228.637.500,00 atau 99,55%.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Visi Kabupaten Sinjai:

” Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”

Misi Kabupaten Sinjai:

Sesuai dengan visi, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Sinjai 2018-2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan indikator terpenuhinya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Meningkatkan investasi daerah, adapun indikatornya adalah Persentase Peningkatan Investasi Penanaman Modal
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Peningkatan Kualitas SDM Aparatur , Sarana dan Prasarana, perencanaan, penganggaran dan kinerja lembaga (Meningkatkan tata kelola pemerintahan)

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam waktu 5 tahun ke depan.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Meningkatnya investasi (PMDN) dengan indikator:
 - a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN)
 - b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp.juta)

2.2.2 Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2020 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya investasi (PMDN)

Indikator :

- Jumlah investor berskala nasional (PMDN),
Target tahun 2021 : 1 investor
- Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp.juta)
Target tahun 2021 : Rp. 1.000,-

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indikator : Indeks Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan target Tahun 2021 adalah nilai 85,90.

2.2.3. Program Pendukung

Adapun program dan kegiatan yang mendukung capaian target tahun 2021 adalah:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya investasi (PMDN)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	1
		Jumlah Nilai investasi Berskala Nasional (Rp. Juta)	Rp. 1.000
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	85,90